

TESIS

**IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU MELALUI
PENERAPAN PAJAK KARBON
UNTUK MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN
INDONESIA TAHUN 2045**



HABIBIE JAYA

No. Mhs.:

245215746

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
2026**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Habibie Jaya
Nomor Mahasiswa : 245215746
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU MELALUI
PENERAPAN PAJAK KARBON UNTUK
MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN
INDONESIA TAHUN 2045

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
-----------------	---------	--------------

1. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.	19 Desember 2025	 
--------------------------------------	------------------	---

2. Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.	19 Desember 2025	 
---	------------------	---



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Habibie Jaya
Nomor Mahasiswa : 245215746
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU MELALUI
PENERAPAN PAJAK KARBON UNTUK
MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN
INDONESIA TAHUN 2045

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 9 Januari
2026

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
---------------	------	--------------

1. Ketua	Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.	
----------	-----------------------------------	-------

2. Anggota	Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.	
------------	--------------------------------------	-------

3. Sekretaris	Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.	
---------------	----------------------------------	-------

Ketua Program Studi,

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Habibie Jaya

No. Mahasiswa : 245215746

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU MELALUI PENERAPAN PAJAK
KARBON UNTUK MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA
TAHUN 2045”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 8 Januari 2026

Yang menyatakan:



Habibie Jaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU MELALUI PENERAPAN PAJAK KARBON UNTUK MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyusunan tesis ini didasarkan pada kesadaran akan semakin meningkatnya urgensi pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan prinsip ekonomi hijau, khususnya melalui instrumen kebijakan fiskal berupa pajak karbon. Penerapan pajak karbon diharapkan mampu menjadi sarana pengendalian emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong transformasi menuju sistem ekonomi nasional yang berwawasan lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

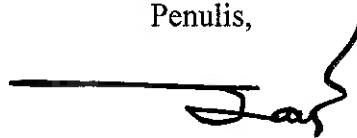
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, kedua beliau yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga sejak tahap awal penyusunan hingga terselesaikannya tesis ini;
4. Seluruh dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan akademik, serta pengalaman berharga selama masa studi;
5. Pimpinan dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dukungan administratif dan fasilitas akademik selama penulis menempuh pendidikan;
6. Kedua orang tua Hasbullah Hassan dan Yuhanna Zoherni, Istri Tercinta Zaina, Kakak, Adik, para Keponakan dan keluarga besar di Lampung dan Jakarta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi yang tulus kepada penulis;
7. Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Bagian Umum, Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal dan seluruh rekan kerja Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal dan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang selalu memberikan

dukungan moril dan materiil serta telah turut membantu penulis dalam menuntaskan perkuliahan dan menyelesaikan penyusunan tesis ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Hukum serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, diskusi, dan semangat selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Tak ada gading yang tak retak, oleh karena itu penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan kebijakan fiskal pada instansi Direktorat Jenderal Pajak serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 8 Januari 2026
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Habibie Jaya', with a long horizontal stroke extending to the left.

Habibie Jaya

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS	i
PENGESAHAN UJIAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Pustaka	21
1. Teori Environmental Kuznets Curve	21
2. Ekonomi Hijau	23
3. Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan	25
4. Pajak	28
5. Regulasi Perpajakan dan Ekonomi Hijau di Indonesia	30
6. Kyoto Protocol	33
7. Agreement on the Establishment of the Global Green Growth Institute	38
8. Paris Agreement	44
B. Landasan Teori	42
1. Teori Kemanfaatan	42
2. Teori Tujuan Hukum	43
C. Batasan Konsep	45

BAB III CARA PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Data Penelitian	48
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Metode Analisa Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Penerapan	
Pajak Karbon	51
B. Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2025 – 2045	54
C. Analisis Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Pajak	
Karbon Terhadap Pencapaian Visi Pembangunan Indonesia	
Tahun 2025 – 2045	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Transformasi menuju ekonomi hijau merupakan agenda strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin kompleks. Indonesia, sebagai negara berkembang dan anggota G20, menghadapi tantangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca guna mewujudkan Visi Pembangunan Indonesia Emas 2045. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah adalah penerapan pajak karbon sebagai bagian dari kebijakan fiskal hijau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan pajak karbon mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi hijau serta menilai efektivitasnya dalam menekan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-deskriptif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, literatur ilmiah, serta publikasi lembaga nasional dan internasional yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara regulasi pajak karbon, prinsip ekonomi hijau, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's), serta arah pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon di Indonesia secara normatif telah mencerminkan prinsip ekonomi hijau, khususnya melalui internalisasi eksternalitas lingkungan, penerapan prinsip *polluter pays*, serta integrasi kebijakan fiskal dengan perlindungan lingkungan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan cakupan sektor, rendahnya tarif awal, kesiapan sistem pengukuran emisi, serta koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan penerimaan pajak karbon secara transparan untuk mendukung transisi energi yang adil. Dengan optimalisasi tersebut, pajak karbon berpotensi menjadi instrumen hukum dan fiskal strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau; Pajak Karbon; Pembangunan Indonesia;

ABSTRACT

The transition to a green economy has become a central policy agenda in response to the growing challenges of climate change and environmental degradation. As a developing country and a member of the G20, Indonesia faces the complex task of sustaining economic growth while reducing greenhouse gas emissions to achieve the Vision of Indonesia Emas 2045. One key policy instrument adopted by the government to support this objective is the introduction of a carbon tax within the framework of green fiscal policy. This study examines the extent to which Indonesia's carbon tax implementation reflects green economy principles from a legal-fiscal perspective and evaluates its effectiveness in reducing greenhouse gas emissions while enhancing state revenue without constraining national economic growth. This research employs a normative legal research methodology with a juridical-descriptive approach. The analysis draws on primary and secondary legal materials, including statutory regulations, fiscal policy instruments, academic literature, and relevant publications from national and international institutions. A qualitative legal analysis examines the relationship between carbon tax regulation, green economy principles, the Sustainable Development Goals (SDGs), and Indonesia's national development framework as stipulated in Law Number 59 of 2024 on the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2025–2045. The findings demonstrate that, from a normative perspective, Indonesia's carbon tax policy aligns with core green economy principles, particularly through the internalization of environmental externalities, the application of the polluter pays principle, and the integration of fiscal instruments with environmental protection objectives. However, the policy's effectiveness remains constrained by several challenges, including limited sectoral coverage, relatively low initial tax rates, inadequate emissions measurement infrastructure, and institutional coordination gaps. Accordingly, this study highlights the need to strengthen the legal design of the carbon tax framework, enhance administrative and institutional capacity, and ensure transparent and accountable allocation of carbon tax revenues to support a just and inclusive energy transition. With such optimization, the carbon tax holds significant potential as a strategic legal and fiscal instrument for advancing sustainable development and achieving the Vision of Indonesia Emas 2045.

Keywords: Green Economy; Carbon Tax; Indonesian Development;